



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
TAHUN 2024**

KECAMATAN SIANTAR UTARA



**PEMERINTAH KOTA
PEMATANG SIANTAR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, karunia, petunjuk dan perlindungan-Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 Kecamatan Siantar Utara ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban dan sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, yang mewajibkan instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja kegiatan dan sasaran yang mengacu pada Renstra Kota Pematang Siantar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini masih banyak kekurangannya, sehingga kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak senantiasa kami harapkan untuk kesempurnaan dalam penyusunan LPPD di tahun-tahun yang akan datang.

Demikian laporan ini disampaikan dengan harapan dapat memberikan gambaran yang sewajarnya mengenai keadaan, perkembangan, permasalahan dan pemecahannya, serta kemajuan yang dicapai Kecamatan Siantar Utara selama Tahun Anggaran 2024.

Pematang Siantar, Januari 2025
CAMAT SIANTAR UTARA



MARLON BRANDO SITORUS, S.STP., M.Si.
PENATA TINGKAT I
NIP. 19910503 201206 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.1.1 Penjelasan Umum..... 1

 a. Dasar Hukum Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Siantar Barat 1

 b. Data Geografis Wilayah 3

 c. Jumlah Penduduk.....4

 d. Jumlah Kelurahan.....6

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ...16

 2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Siantar Utara Tahun 2024..... 16

BAB III PENUTUP.....27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

A. DASAR HUKUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN Siantar Utara

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar diselenggarakan dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3328);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematang Siantar;
11. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematang Siantar Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Walikota Pematang Siantar Nomor 06 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pematang Siantar.

B. Data Geografis Wilayah

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian dipedomani oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota maka melalui Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor 388 Tahun 2001 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pematang Siantar, istilah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar berubah menjadi Kota Pematang Siantar.

Sampai saat ini Kecamatan Siantar membawahi 8 (delapan) Kelurahan dengan total luas wilayah 3.205 km² (4,01% dari luas wilayah Kota Pematang Siantar), yang terdiri dari:

- 1. Kelurahan Martoba dengan luas wilayah : 0.320 km²
- 2. Kelurahan Melayu dengan luas wilayah : 0,370 km²
- 3. Kelurahan Baru dengan luas wilayah : 0,250 km²
- 4. Kelurahan Sukadame dengan luas wilayah : 0,510 km²
- 5. Kelurahan Bane dengan luas wilayah : 1,170 km²
- 6. Kelurahan Sigulang-gulang dengan luas wilayah : 0,580 km²
- 7. Kelurahan Kahean dengan luas wilayah : 0,450 km²

Kecamatan Siantar Utara mempunyai batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- a.Sebelah Utara : Berbatasan dengan kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara
- b.Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Simalungun Kecamatan Siantar Selatan
- c.Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur
- d.Sebelah Barat : Berbatasan dengan kelurahan Setia Negara Kecamatan Siantar Sitalasari

Kecamatan Siantar Utara berada di pusat kota Pematng Siantar, terletak pada ketinggian 400-410 m di atas permukaan laut, dengan bentuk wilayah dataran dan berbukit-bukit, beriklim sedang (sub tropis) dengan suhu rata-rata 23⁰C-32⁰C/tahun.

Tabel 1.2.1
 Letak Geografis Ketinggian dari permukaan laut
 Dirinci menurut Kelurahan

No	Kelurahan	Letak Geografis		Ketinggian		
		Pantai	Bukan Pantai	<500	500-700	700+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Martoba	-	✓	✓	-	-
2	Melayu	-	✓	✓	-	-
3	Baru	-	✓	✓	-	-
4	Sukadame	-	✓	✓	-	-
5	Bane	-	✓	✓	-	-
6	Sigulanggulang	-	✓	✓	-	-
7	Kahean	-	✓	✓	-	-

Sumber: Kasi Pemerintahan Kecamatan Siantar Utara

C. Jumlah Penduduk

Kecamatan Siantar Utara merupakan kecamatan yang memiliki penduduk yang heterogen dan majemuk terdiri dari berbagai suku dan agama dengan jumlah penduduk 51.152. Hal ini didukung dengan letaknya yang sangat startegis dengan luas wilayah sebesar 3.650 km yang merupakan wilayah perlintasan mobilitas penduduk ke daerah lain seperti ke Parapat, Tarutung, Tanah Karo, Tebing Tinggi dan Medan.

a. Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan klasifikasi jenis kelamin, jumlah penduduk Kecamatan Siantar Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Kelurahan
Tahun 2024

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Martoba	5282	5118	10400
2	Melayu	4837	4750	9587
3	Baru	3985	3803	7788
4	Sukadame	1783	1727	3510
5	Bane	3240	3243	6483
6	Sigulanggulang	3112	3186	6298
7	Kahean	3690	3816	7506
Jumlah				

Sumber: Kasi Pemerintahan Kecamatan Siantar Utara

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di wilayah kelurahan Martoba dengan jumlah penduduk sebanyak 9793 jiwa dan penduduk yang paling sedikit berada di kelurahan Sukadame sebanyak 3645 jiwa.

b. Klasifikasi Penduduk berdasarkan Agama

Adapun sarana ibadah menurut kelurahan yang ada di Kecamatan Siantar Utara dapat dilihat dalam daftar tabel berikut:

Tabel 1.2.3
Jumlah Sarana Ibadah menurut Kelurahan
Tahun 2024

No	Kelurahan	Agama					
		Mesjid	Langgar	Gereja	Pura	Vihara	Klenteng
1	Martoba	4	0	0	0	0	0
2	Melayu	4	2	0	0	1	7
3	Baru	5	1	4	0	0	2
4	Sukadame	1	0	0	0	0	0
5	Bane	1	0	4	0	0	0

6	Kahean	2	0	6	0	0	0
7	Sigulanggulang	1	0	4	0	0	0
Jumlah		18	3	18	0	1	9

Sumber: Kasi Pemerintahan Kecamatan Siantar Utara

d.Jumlah Kelurahan

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kota Pematang Siantar yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang camat, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Camat memiliki tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota termasuk menangani sebagian urusan penunjang pemerintahan sedangkan kelurahan merupakan perangkat daerah Kota Pematang Siantar yang berkedudukan dalam wilayah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat. Dimana Camat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu seorang Lurah juga melaksanakan urusan penunjang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

Sampai saat ini Kecamatan Siantar Utara membawahi 7 (tujuh) Kelurahan dengan total luas wilayah 3.650 km² (4,01% dari luas wilayah Kota Pematang Siantar), yang terdiri dari:

- 1. Kelurahan Martoba
- 2. Kelurahan Melayu
- 3. Kelurahan Baru
- 4. Kelurahan Sukadame
- 5. Kelurahan Bane
- 6. Kelurahan Sigulanggulang
- 7. Kelurahan Kahean

Dalam melaksanakan pemerintahan di Kecamatan Siantar Utara didukung juga oleh Kepala Lingkungan, RW, dan RT dari tiap-tiap Kelurahan. Adapun jumlahnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2.4
Jumlah RT, RW dan Lingkungan
Menurut Kelurahan Tahun 2024

No	Kelurahan	Luas (Km ²)	Lingkungan	RW	RT
1	Martoba	0,320	3	10	33
2	Melayu	0,370	2	7	21
3	Baru	0,250	2	9	19
4	Sukadame	0,510	2	9	28
5	Bane	1,170	2	8	25
6	Sigulanggulang	0,580	2	8	25
7	Kahean	0,450	2	7	25
Jumlah		3,65	15	58	176

Sumber: Kasi Pemerintahan Kecamatan Siantar Utara

BAB II

CAPAIN KINERJA PEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Siantar Utara Tahun 2024

2.1.1. Capaian Kinerja Program sesuai dengan Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pembersihan dan Pengangkutan Sampah Lingkungan sampai ke TPSS	100
		Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di Wilayah Kecamatan	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85
3	Sicepat Siantar Utara	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

No.	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Sampah	1.471.279.447	APBD
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	618.540.000	APBD
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.534.959.242	APBD
4.	Program Penyelenggaran Pemerintahan Dan Pelayanan Dan Pelayanan Publik	35.040.000	APBD
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.454.234.839	APBD
6.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	10.151.600	APBD
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	285.907.556	APBD
TOTAL		11.410.112.684	

Pencapaian kinerja Sasaran Strategi Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar tahun 2024 berdasarkan masing-masing indikator dan satuan pengukurannya, pada umumnya menunjukkan capaian kinerja didukung dengan penetapan anggaran sebagai berikut:

No.	Program	Anggaran(Rp)
1	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.471.279.447
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	618.540.000
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.534.959.242
4	PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.040.000
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.454.234.839
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.151.600
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	285.907.556
TOTAL		11.410.112.684

2.1.2. Capaian Kinerja Keluaran Anggaran, Realisasi Kegiatan, Target, Masalah dan Solusi

2.1. Capaian Kinerja Anggaran, Realisasi, Target

2.1.1. Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2024		PERSENTASE
			TARGET	REALISASI	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	B	BB	78,83
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pembersihan dan Pengangkutan Sampah Lingkungan sampai	100	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2024		PERSENTASE
			TARGET	REALISASI	
		ke TPSS			
		Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani di Wilayah Kecamatan	100	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	93,72	110,25
	Sicepat Siantar Utara	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1	1	100

2.1.3 ANALISIS KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA SESUAI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

1. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator kinerja	TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI
1.	Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Pembersihan Lingkungan di Kecamatan/ Kelurahan	100 %	100 %

Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintahan Kecamatan melalui responsifitas terhadap Peningkatan Pengelolaan Sampah adalah sebesar 100 % dari 100 % target kinerja. Capaian kinerja dapat dilihat dari Indikator kinerja (out put) yang meliputi anantara lain:

1. Terlaksananya Pembersihan Lingkungan di Kecamatan/ Kelurahan
2. Terlaksananya pengkoordiniran kegiatan penyapuan jalan, pengumpulan sampah, pembabatan, pembersihan parit/selokan dan penggalian sedimen
3. Peningkatan penangan sampah di wilayah Kecamatan Siantar Utara
4. Terlaksananya kegiatan LISAPIL di Kecamtan Siantar Utara
5. Terlaksananya kegiatan gotong royong di wilayah Kecamatan Siantar Utara

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator kinerja	TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI
1.	Terwujudnya Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100 %	100 %

Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 100 %. Capaian Kinerja ini dapat dilihat dari Indikator Kinerja (Out Put) yang meliputi antara lain:

1. Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Terbayarnya Honorarium RT, RW, Kepling, PKK, LPM, Posyandu, dan Karang Taruna Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
3. Peningkatan Pelayanan Perangkat Desa/Kelurahan kepada masyarakat.

3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator kinerja	TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI
1.	Terciptanya kualitas pelayanan publik yang prima serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	100 %	100 %

Capaian Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kecamatan Siantar Utara adalah sebesar 100 % dari target capaian kinerja sebesar 100%.

Capaian Kinerja ini dapat dilihat dari Indikator kinerja (Out Put) yang meliputi antara lain:

- 1. Tersusunya dokumen perencanaan perangkat daerah
- 2. Terbayarnya Gaji dan honorarium PNS/ Non PNS Daerah
- 3. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 4. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
- 5. Tersediaanya pakaian dinas beserta atribut kelengkapanya
- 6. Tersediaanya peralaan rumah tangga
- 7. Tersedianya alat tulis kantor
- 8. Tersediaanya jasa surat-menyurat
- 9. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
- 10. Tersedianya bahan logistik kantor
- 11. Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 12. Tersediaanya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan
- 13. Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- 14. Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator kinerja	TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI
1.	Terciptanya kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %

Capaian Kinerja Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kecamatan Siantar Utara adalah sebesar 100 % dari target capaian kinerja sebesar 100%. Capaian Kinerja ini dapat dilihat dari Indikator kinerja (Out Put) antara lain:

- 1. Terlaksananya musyawarah musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan kecamatan
- 2. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator kinerja	TAHUN 2024	
				TARGET	REALISASI
1.	Terciptanya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	99,98 %

Capaian Kinerja Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Siantar Utara adalah sebesar 99,96% dari target capaian kinerja sebesar 100%. Capaian Kinerja ini dapat dilihat dari Indikator kinerja (Out Put) yang meliputi antara lain:

- 1. Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional melalui kegiatan MTQ Kecamatan
- 2. Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan

CAPAIAN KINERJA KELUARAN MASING MASING KEGIATAN SESUAI DENGAN TARGET DALAM DOKUMEN ANGGARAN

TABEL CAPAIAN KINERJA SESUAI DENGAN DOKUMEN ANGGARAN

Program	Kegiatan	Target		Realisasi
		Target	Anggaran	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		100%	1.471.279.447	1.460.241.900
	Penanganan Sampah melalui Pengangkutan	8994 Ton	54.567.500	46.020.000
	Penanganan Sampah melalui Pengumpulan Sampah	100%	1.416.711.947	1.414.221.900
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			618.540.000	616.065.000

	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah dan Kabupaten/Kota , serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupten/Kota		618.540.000	616.065.000
	Peningkatan kapsaitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan (RT,Rw,PKK,Posyandu,LPM, Dan karang taruna)Lembaga adat desa/ Kelurahan dana masyarakat Hukum adat	35 Lembaga Kemasyarakatan	618.540.000	616.065.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.534.959.242	7.357.739.649
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.674.426	2.181.200
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.674.426	2.181.200
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.622.114.073	6.476.699.204
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/Bulan	6.622.114.073	6.476.699.204
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		196.298.588	195.849.420
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	3.823.860	3.822.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	81.736.630	81.621.200
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 Paket	11.720.618	11.701.500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	15.227.400	15.060.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan pengadaan	4 Paket	11.190.080	11.044.720
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	72.600.000	72.600.000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			107.303.475	106.557.000
	Pengadaan Mebel	79 Unit	34.764.600	34.324.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	13 unit	72.538.875	72.233.00011
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			490.982.680	482.672.345
	Penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	2.900.000	2.887.500
	Penyediaan jasa komonikasi,Sumber daya air dan listrik	12 laporan	41.422.680	36.818.845
	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	12 laporan	446.660.000	442.966.000
Pemeliharaan Barag Milik Daera Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			115.586.000	93.780.480
	Penyedian jasa Pemeliharaan,Biya Pemeliharaan,Pajak dan perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	9 Unit	103.206.000	81.410.130
	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	18 Unit	12.380.000	12.370.350
Program penyelenggaraan pemerintahan dan penlayanan publik			35.040.000	34.650.000
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan		35.040.000	34.650.000
	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat diwilayah kecamatan	12 laporan	35.040.000	34.650.000
Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan			1.454.234.839	1.453.858.400
	Kegiatan pemberdayaan masyarakat		1.454.234.839	1.453.858.400

	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan dikelurahan	35 Lembaga Kemasyarakatan	54.222.746	53.858.400
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	6 Unit	1.100.012.093	1.100.000.000
	Pemberdayaan masyarakat dikelurahan	6 Ormas/Pokmas	300.000.000	300.000.000
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			10.151.600	9.960.000
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		10.151.600	9.960.000
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	10.151.600	9.960.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			285.907.556	278.463.005
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		285.907.556	278.463.005
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	700 Orang	176.887.108	172.636.405
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	700 Orang	67.020.448	63.826.600
	Pelaksanaan Tugas Forum Kordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen	42.000.000	42.000.000
Total			11.410.112.684	11.210.977.954

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN SIANTAR UTARA TAHUN 2024

No.	Urusan Pemerintahan	OPD Pelaksana	Kebijakan	Program	Kegiatan	Anggaran		Realisasi		Permasalahan	Tindak Lanjut Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						(%)	(Rp)	(%)	(Rp)			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kec. Siantar Utara	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima serta Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	100%	1.471.279.447	99.25%	1.460.241.900	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	UNSUR KEWILAYAHAN	Kec. Siantar Utara		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah dan Kabupaten/Kota, serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam daerah Kabupten/Kota							

					Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Pos yandu,LPM & karang taruna)Lemga adat Desa/kelurahan dan masyarakat hukum Adat	100%	618.540.000	100%	616.065.000	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	UNSUR KEWILAYAHAN	Kec. Siantar Utara	Perda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK,Pos yandu,LPM & karang taruna)Lemga adat Desa/kelurahan dan masyarakat hokum Adat	100%	7.534.959.242	97,65%	7.357.739.649	NIHIL	NIHIL	NIHIL
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
					Penyediaan gaji dan tunjangan ASN			67 Orang/bulan	67 Orang/bulan	NIHIL	NIHIL	NIHIL
					Administrasi Umum Perangkat Daerah							
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			4 paket	4 paket	NIHIL	NIHIL	NIHIL
					Penyediaan peralatan perlengkapan kantor			4 paket	4 paket	NIHIL	NIHIL	NIHIL

					Penyediaan peralatan rumah tangga			4 paket	4 paket	NIHIL	NIHIL	NIHIL
					Penyediaan bahan logistic kantor			4 paket	4 paket	NIHIL	NIHIL	NIHIL
					Penyediaan barang cetakan dan pengadaan			4 paket	4 paket	NIHIL	NIHIL	NIHIL
					Penyelenggaraan Rapat kordinasi dan konsultasi SKPD			30 laporan	26 laporan	Tidak ada Jadwal undangan	Merubah target untuk tahun berikutnya	
					Penatausahaan aisiip dinamis pada SKPD			12 dokumen	12 dokumen	NIHIL	NIHIL	NIHIL
					Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah							
					Pengadaan Mobil			55 Unit	55 Unit	NIHIL	NIHIL	NIHIL
					Pengadaan peralatan dan mesin lainnya			13 Unit	11 Unit	Tidak terealisasi karena kendala tingkat komponen dalam negeri (TKDN)	Kordinasi kepda pejabat pengadaan atas belanja tersebut yang memenuhi TKDN	

					Prograram penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik			80%	84,49%	NIHIL	NIHIL	NIHIL
					Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan							
					Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan			12 laporan	12 laporan	NIHIL	NIHIL	NIHIL
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		1.454.234.839	99,97%	1.453.858.400	NIHIL	NIHIL	NIHIL
					Kegiatan pemberdayaan kelurahan							
					Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan			35 lembaga	35 lembaga kemasyarakatan	NIHIL	NIHIL	NIHIL
					Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan			7 unit	7 unit	NIHIL	NIHIL	NIHIL
					Pemberdayaan masyarakat di kelurahan			1 Ormas/pokmas	1 Ormas/pokmas	NIHIL	NIHIL	NIHIL
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			100%	98,96			

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

NO	MASALAH	PEMECAHAN MASALAH
1.	- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	- Mengusulkan dalam APBD dalam hal pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi pelaksanaan tugas pemerintahan
2.	- Keterbatasan jumlah personil - Tidak memadainya kualitas dan kuantitas TPS, dan peralatan kebersihan yang masih kurang	- Mengusulkan penambahan personil dan menempatkan dan mendistribusikannya pada lokasi-lokasi di seluruh wilayah. - Melakukan analisa mendalam terhadap tingkat kebutuhan TPS dan sarana Prasarana Kebersihan dan mengusulkan melalui APBD untuk mengadakannya.
3.	- Kurangnya kesadaran masyarakat	- Memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. - Membentuk kelompok-kelompok swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. - Bekerja sama dengan masyarakat dan organisasi kepemudaan dalam kegiatan kemasyarakatan.

BAB III

PENUTUP

Penyusunan, Pembuatan dan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, yang dalam hal ini disebut LPPD Kecamatan Siantar Utara Tahun 2024 adalah wujud dari akuntabilitas dan transparansi dari penyelenggara pemerintahan Kecamatan Siantar Utara. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Kepala daerah kepada DPRD, dan Informasi LPPD kepada masyarakat, Walikota diwajibkan menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan mempublikasikan LPPD kepada masyarakat luas. Walaupun secara prinsip telah mengacu kepada Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan PP No. 3 tahun 2007, tetapi tata cara penilaian kinerja dalam laporan ini masih didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Siantar Utara Tahun Anggaran 2024 ini menggunakan sistematika yang meliputi Pendahuluan, Perubahan Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah, Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Daerah, Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan, dan Penutup.

Berdasarkan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2024 maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi terhadap 5 program diperoleh nilai rata-rata sebesar 92,86 %.
2. Hasil evaluasi terhadap 11 kegiatan/23 Sub kegiatan diperoleh nilai rata-rata sebesar 92,86 %.

Walaupun secara makro hasil evaluasi tingkat capaian kinerja cukup berhasil, bukan berarti bahwa tidak ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan dan program pada tahun 2024. Secara jujur dan terbuka harus diakui masih terdapat beberapa kegiatan yang hasilnya kurang optimal dan belum dapat memenuhi semua harapan masyarakat, swasta dan pemerintah.



Pematang Siantar, Januari 2025
CAMAT SIANTAR UTARA

MARLON BRANDO SITORUS, S.STP., M.Si.
PENATA TINGKAT I
NIP. 19910503 201206 1 001